ANALISIS PENETAPAN FORMASI JABATAN PPAT DI KABUPATEN TANGGAMUS

FX. Sumarja

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penetapan formasi jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Tanggamus dan faktor penghambatnya. Penetapan formasi jabatan PPAT di Kabupaten Tanggamus belum berdasarkan 3 (tiga) faktor sesuai rumusan Permeneg Agraria/ Kepala BPN No 4 Tahun 1999 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Dalam menentukan jumlah formasi PPAT dalam suatu Kabupaten/Kota harus dilihat dari jumlah kecamatan, jumlah pendaftaran peralihan hak dan jumlah pendaftaran hak tanggungan. Salah satu faktor penghambat dalam penetapan formasi jabatan PPAT di Kabupaten Tanggamus adalah belum adanya aturan baru tentang penetapan formasi PPAT.

Kata Kunci: Analisis Penetapan Formasi Jabatan PPAT, PPAT

A. PENDAHULUAN

Tanah merupakan suatu faktor yang sangat penting dalam kehidupan suatu masyarakat, terutama bagi masyarakat Indonesia yang sebagian besar penduduknya menggantungkan kehidupannya dari tanah. Dalam rangka pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, tanah juga merupakan salah satu modal utama, baik sebagai wadah pelaksanaan pembangunan maupun sebagai faktor produksi untuk menghasilkan komoditas-komoditas perdagangan yang sangat diperlukan guna meningkatkan pendapatan nasional. Penataan penggunaan tanah perlu memperhatikan hak-hak rakyat atas tanah, termasuk berbagai upaya untuk mencegah pemusatan penguasaan tanah agar makin terwujud sistem pengelolaan tanah yang terpadu, serasi, efektif, efisien.

Hak atas tanah berkaitan dengan isi kewenangan pemegang haknya, dikatakan oleh Boedi Harsono (1999: 23) bahwa hak atas tanah berisikan serangkaian wewenang, kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang diiliki. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang

terkandung didalamnya, dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Untuk tercapainya tujuan tersebut penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah perlu memperhatikan dua aspek, yaitu:

- a. aspek penggunaan yang menggariskan penggunaan tanah sesuai dengan kemampuan tanah dan lingkungannya;
- b. aspek keamanan pengusahaan yang berupa jaminan kepastian hukum penguasaan hak atas tanah.

Dalam rangka tertib administrasi pertanahan, data pendaftaran tanah yang tercatat di kantor pertanahan harus sesuai dengan keadaan atau status sebenarnya mengenai bidang tanah, baik yang menyangkut data fisik mengenai bidang tanah maupun mengenai hubungan hukum yang menyangkut bidang tanah itu atau data yuridisnya. Dalam hubungan dengan pencatatan data yuridis, khususnya pencatatan perubahan data yuridis yang sudah tercatat sebelumnya, peran dan fungsi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sangatlah penting. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, peralihan dan pembebanan hak atas tanah hanya dapat didaftar jika dibuktikan dengan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sudah dikenal sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang sekarang diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Peraturan Pemerintah tersebut merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Dalam peraturan tersebut, PPAT sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan membuat akta tanah yang bermaksud memindahkan hak atas tanah atau pembebanan hak atas tanah.

Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan data perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang. Dalam keadaan tertentu sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri, kepala kantor pertanahan dapat mendaftarkan pemindahan hak atas tanah bidang tanah hak milik, yang dilakukan diantara perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan akta yang tidak dibuat oleh PPAT, tetapi yang menurut kepala kantor pertanahan tersebut kadar kebenarannya dianggap cukup untuk, mendaftarkan pemindahan hak yang bersangkutan (Pasal 37 Ayat (1) dan (2) PP No. 24 Tahun 1997). Pembebanan hak tanggungan pada hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun, pembebanan hak guna bangunan, hak pakai dan hak sewa untuk bangunan atas hak milik, dan pembebanan lain pada hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang ditentukan dengan Peraturan Perundang-undangan, dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (PP No. 24 Tahun 1997 Pasal 44 Ayat (1)).

Adapun tujuan Pendaftaran Tanah berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997 adalah:

- a. Untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas tanah suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan,
- b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar,
- c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Dengan diselenggarakannya pendaftaran tanah maka pihak-pihak yang bersangkutan dapat dengan mudah mengetahui status atau kedudukan hukum dari tanah-tanah tertentu yang dihadapinya, letak, luas dan batas-batas, siapa yang empunya dan beban-beban apa yang ada di atasnya. Sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftarkan dalam buku tanah. Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah. Dalam penerbitan sertifikat tanah tidak terlepas dari peran PPAT yang bertugas melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum.

Dalam melaksanakan tugasnya seorang PPAT mempunyai wilayah kerja tertentu. Bagi PPAT wilayah kerjanya adalah satu kabupaten/kota, dan bagi PPAT sementara wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja jabatan yang diembannya, misalnya Camat Pringsewu sebagai PPAT sementara wilayah kerjanya adalah Kecamatan Pringsewu. Jumlah PPAT di Kabupaten Tanggamus saat ini 33 orang yang terdiri dari 24 PPAT sementara dan 9 PPAT, sementara itu berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 4 Tahun 1999 formasi PPAT untuk Kabupaten Tanggamus adalah 30. Menurut Kepala Subseksi Peralihan Pembebanan Hak dan PPAT Herman Latoptindas RH, S.H di Kabupaten Tanggamus jumlah formasi PPAT masih perlu ditambah.

Dalam hal ini ada sesuatu yang harus dikaji lagi, yaitu berdasarkan peraturan formasi PPAT

hanya 30 dan telah terisi 33 PPAT, namun jumlah tersebut masih dirasa kurang oleh pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Tanggamus. Menurut Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 4 Tahun 1999 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT, mengatur bahwa penentuan formasi jabatan PPAT harus mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu:

- Jumlah kecamatan di daerah yang bersangkutan;
- Tingkat perkembangan ekonomi daerah yang bersangkutan;
- Jumlah bidang tanah yang sudah bersertifikat di daerah yang bersangkutan;
- Frekuensi peralihan hak di daerah yang bersangkutan dan prognosa mengenai pertumbuhannya;
- Jumlah rata-rata akta PPAT yang dibuat di daerah kerja yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian di atas permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- Bagaimanakah penetapan formasi jabatan PPAT di Kabupaten Tanggamus?
- Faktor-faktor apa yang menghambat penetapan formasi jabatan PPAT?

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris, analisis data secara kualitatif.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penetapan Formasi PPAT

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) diangkat oleh Menteri yang berwenang untuk itu. Pengangkatan PPAT bukan untuk kepentingan diri pribadi pejabat itu sendiri akan tetapi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan alat bukti tertulis dan otentik dari perbuatan yang dilakukan oleh mereka yang berkepentingan. Sebagai pejabat yang melaksanakan sebagian tugas dibidang pendaftaran tanah, maka jabatan PPAT selalu dikaitkan dengan suatu wilayah tertentu yang menjadi wilayah kerjanya. Pada prinsipnya di dalam suatu wilayah kecamatan ada seorang PPAT. Untuk suatu wilayah yang belum dipenuhi formasi pengangkatan PPAT, maka dapat ditunjuk Camat sebagai PPAT Sementara.

Sesuai ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT formasi PPAT untuk setiap daerah kerja PPAT ditetapkan oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Kabupaten/Kota yang jumlah PPATnya termasuk PPAT Sementara sama atau lebih besar dari formasi PPAT yang ditetapkan, dinyatakan sebagai daerah yang tertutup untuk pengangkatan PPAT. Di Kabupaten/Kota yang sudah merupakan daerah yang tertutup untuk pengangkatan PPAT, apabila terjadi penggantian Camat maka Camat baru tidak dapat ditunjuk sebagai PPAT Sementara.

Perhitungan formasi PPAT di Kabupaten/Kota menggunakan rumus yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998, yang masih dalam proses penyelesaiannya. Faktor yang digunakan dalam rumus adalah jumlah Kecamatan dan jumlah Pendaftaran Peralihan Hak, Pendaftaran Hak Tanggungan rata-rata dalam 3 (tiga) tahun terakhir pada masing-masing Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 4 Tahun 1999 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, dengan petunjuk dan penjelasan sebagai berikut:

- mengenai hak dan kewajiban PPAT termasuk larangan-larangan, dimaksudkan agar PPAT dapat melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat sebagaimana mestinya. Kewajiban dan larangan tersebut merupakan kriteria dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan PPAT;
- dalam rangka pengangkatan PPAT, dilaksanakan ujian. Ujian untuk diangkat menjadi PPAT menurut peraturan ini diselenggarakan hanya untuk mengisi lowongan dalam formasi di suatu daerah kerja PPAT tertentu (Pasal 4 Ayat 2). Dengan ketentuan ini maka tidak akan ada lagi PPAT yang sudah lulus ujian tetapi belum mempunyai daerah kerja, karena kelulusan itu

- adalah khusus untuk mengisi lowongan yang ada;
- c. mengenai Kantor PPAT dan tempat pembuatan akta. PPAT sebagai pelaksana sebagian fungsi pelayanan di bidang pendaftaran tanah diwajibkan berkantor di daerah kerjanya (Pasal 12 Ayat 1) dan memberikan pelayanannya kepada masyarakat setiap hari kerja (Pasal 13). Walaupun PPAT yang bersangkutan sedang menjalani cuti, kantor PPAT harus tetap buka untuk memberikan pelayanan yang tidak memerlukan kehadiran PPAT, yaitu yang menyangkut pemberian keterangan atau dokumen, misalnya salinan akta (Pasal 13 Ayat 3). Pembuatan akta PPAT wajib dilakukan di kantor PPAT, kecuali apabila salah satu pihak atau kuasa yang harus hadir di kantor PPAT tidak dapat datang karena alasan yang sah, misalnya karena sakit atau alasan lain di luar kekuasaan yang bersangkutan, sehingga PPAT perlu mendatangi orang tersebut. Dalam hal yang demikian PPAT diperbolehkan membuat akta ditempat orang tersebut berada dengan ketentuan bahwa para pihak yang bersangkutan harus hadir bersama di hadapannya (Pasal 17);
- d. oleh karena akta PPAT tersebut akan dipergunakan sebagai bukti otentik mengenai perbuatan hukum yang mengakibatkan perubahan data yuridis pendaftaran tanah, maka kejelasan beberapa aspek dari perbuatan hukum tersebut menjadi tanggungjawab PPAT, di antaranya:

- a) kebenaran dari kejadian yang termuat dalam akta, misalnya mengenai jenis perbuatan hukum yang dimaksud oleh para pihak, mengenai sudah dilakukannya pembayaran dalam jual beli, dan lain sebagainya;
- b) obyek perbuatan hukum, baik data fisik maupun data yuridisnya;
- c) identitas para penghadap yang merupakan pihak-pihak yang melakukan perbuatan hukum.

Penentuan Jumlah Formasi PPAT

Formasi jabatan PPAT ditetapkan oleh Menteri (sekarang Kepala Badan Pertanahan Nasional). Perhitungan formasi PPAT di suatu Kabupaten/Kota menggunakan rumus yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1999. Unsur yang digunakan dalam penetapan formasi PPAT adalah Jumlah Kecamatan, Jumlah Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah dan Jumlah Pendaftaran Hak Tanggungan rata-rata dalam 3 (tiga) tahun terakhir pada masing-masing Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1999 tanggal 26 Februari 1999 tentang Penetapan Formasi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, formasi untuk Propinsi Lampung dapat diperhatikan tabel berikut:

Tabel 1. Formasi PPAT Propinsi Lampung berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN Nomor 4 Tahun 1999

No.	Kabupaten/ Kotamadya	Formasi	Ket
1	Kod. Bandar Lampung	45 (empat puluh lima)	
2	Kab. Lampung Selatan	35 (tiga puluh lima)	
3	Kab. Lampung Tengah	55 (lima puluh lima)	
4	Kab. Lampung Utara	35 (tiga puluh lima)	
5	Kab. Lampung Barat	20 (dua puluh)	
6	Kab. Tanggamus	30 (tiga puluh)	
7	Kab. Tulang Bawang	25 (dua puluh lima)	

Formasi PPAT untuk Kabupaten Tanggamus adalah 30, sementara itu Kabupaten

Tanggamus yang terdiri dari 24 (dua puluh empat) kecamatan saat ini memiliki 9 (sembilan) PPAT,

dan 24 (dua puluh empat) PPAT Sementara (Camat), jadi saat ini di Kabupaten Tanggamus sudah memiliki 33 PPAT. Berdasrkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN tersebut jumlah formasi PPAT di Kabupaten Tanggamus sudah melebihi dari ketentuan yang ada, namun menurut keterangan Kepala Subseksi Peralihan Pembebanan Hak dan PPAT Herman Latoptindas RH, S.H Kabupaten Tanggamus tidak membatasi jumlah formasi PPAT. Pada saat ini di Kabupaten Tanggamus masih membuka formasi PPAT, mengingat Kabupaten Tanggamus yang sedang berkembang dan ramai penduduknya dan banyak memerlukan jasa PPAT.

Seharusnya menurut ketentuann tiap 3 tahun sekali formasi PPAT ditinjau kembali, apakah terdapat penambahan atau justru mengalami pengurangan formasi. Namun hingga tahun 2007 formasi tersebut belum pernah ditinjau kembali. Oleh karenanya untuk Kabupaten Tanggamus berdasarkan pertimbangan perkembangan pembangunan daerah sudah semestinya jika formasi PPAT bertambah. Dengan demikian penetapan formasi PPAT berdasarkan peraturan tahun 1999 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan kabupaten itu sendiri. Meskipun saat ini belum ada peraturan yang baru tentang penetapan formasi PPAT, tetapi secara realita telah terdapat perubahan/penambahan formasi PPAT di Kabupaten Tanggamus dari 30 menjadi 33 formasi PPAT.

Berdasarkan wawancara dengan seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah Drs. Zulkarnain, ia mengatakan bahwa jumlah formasi PPAT saat ini belum sesuai dengan kebutuhan di Kabupaten Tanggamus, dalam artian di Kabupaten Tanggamus masih kekurangan tenaga maupun jasa PPAT. Hal ini dilihat dari jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Tanggamus sebanyak 24 kecamatan, dan dilihat dari banyaknya penduduk yang melakukan Pendaftaran Peralihan Hak dalam 3 (tiga) tahun terakhir, yakni pada tahun 2004 sebanyak 44 bidang, tahun 2005 sebanyak 40 bidang dan pada tahun 2006 sebanyak 350 bidang. Sedangkan jumlah pemegang hak atas tanah yang melakukan Pendaftaran Hak Tanggungan dalam 3 (tiga) tahun terakhir yakni, tahun 2004 sebanyak 232 orang, tahun 2005 sebanyak 324 orang, dan tahun 2006 sebanyak 577 orang. Jika diperhatikan dari tahun 2004

sampai dengan tahun 2006 terjadi peningkatan jumlah pemegang hak atas tanah yang melakukan Pendaftaran Peralihan Hak dan Pendaftaran Hak Tanggungan.

Lebih lanjut dari hasil wawancara dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanggamus bapak Ir. Hasan Husaini, diketahui bahwa persyaratan dan prosedur penetapan formasi PPAT di Kabupaten Tanggamus sudah sesuai atau dilaksanakan berdasarkan peraturan hukum yang ada. Hanya saja untuk menetapkan jumlah formasi PPAT yang dibutuhkan di Kabupaten Tanggamus belum berdasarkan 3 (tiga) unsur sesuai aturan yang telah ditentukan dalam Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 4 Tahun 1999.

Prosedur Pengangkatan PPAT

Untuk dapat diangkat sebagai PPAT yang bersangkutan harus lulus ujian yang diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional, guna memenuhi formasi PPAT di Kabupaten/Kota tertentu yang formasi PPAT-nya belum terpenuhi. Materi ujian PPAT terdiri dari:

- a. Hukum Tata Nasional;
- b. Pendaftaran Tanah;
- c. Peraturan Jabatan PPAT;
- d. Pembuatan Akta PPAT.

Untuk mengikuti ujian PPAT yang bersangkutan harus mendaftar pada pelaksana ujian dengan menyertakan:

- a. Fotocopy KTP yang masih berlaku;
- b. Fotocopy ijazah Program Pendidikan Spesialis Notariat atau Program Pendidikan Khusus PPAT;
- c. Bagi calon peserta ujian yang sudah menjabat Notaris: fotocopy pengangkatan sebagai Notaris dengan tempat kedudukan di tempat yang termasuk di dalam daerah kerja PPAT yang formasinya akan diisi dengan ujian yang bersangkutan.

Permohonan untuk diangkat sebagai PPAT diajukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional oleh calon PPAT yang sudah lulus ujian dilengkapi dengan:

- a. Surat Keterangan Berkelakuan Baik yang dikeluarkan oleh instansi kepolisian;

- b. Surat pernyataan bermaterai cukup dari yang bersangkutan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan belum pernah dihukum penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Surat Keterangan Kesehatan dari dokter umum atau dokter spesialis yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sehat jasmani dan rohani;
- d. Fotocopy ijazah Program Pendidikan Spesialis Notariat atau Program Pendidikan Khusus PPAT yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan tinggi, yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- e. Surat pernyataan bermaterai cukup dari yang bersangkutan mengenai kesediaannya untuk ditunjuk sebagai penerima protocol PPAT lain.

Sedangkan permohonan pengangkatan kembali PPAT yang berhenti karena permintaan sendiri atau dalam rangka penyesuaian dengan tempat kedudukannya sebagai Notaris, diajukan kepada Kepala BPN oleh yang bersangkutan disertai dengan:

- a. Fotocopy Keputusan Pengangkatan yang bersangkutan sebagai PPAT dan Berita Acara Pengangkatan Sumpah Jabatan PPAT di daerah kerja semula;
- b. Fotocopy Keputusan Pengangkatan yang bersangkutan sebagai Notaris serta Berita Acara Sumpah Jabatan Notaris di daerah kerja yang dituju, dan Berita Acara Penyerahan Protokol PPAT di daerah kerja semula, bagi pengangkatan PPAT untuk penyesuaian dengan tempat kedudukannya sebagai Notaris;
- c. Surat pernyataan kesanggupan bersedia menerima protokol dari PPAT calon penerima protokol di daerah kerja semula, bagi pengangkatan kembali PPAT yang berhenti karena permintaan sendiri.

Faktor Penghambat Penetapan Formasi Jabatan PPAT

Dalam penetapan formasi jabatan PPAT terdapat hambatan yang dihadapi Kantor Pertanahan Kabupaten Tanggamus, antara lain:

- a. Penetapan/perhitungan jumlah formasi jabatan PPAT belum berdasarkan unsur-unsur yang

ditentukan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 4 Tahun 1999 yakni berdasarkan jumlah kecamatan, jumlah pendaftaran peralihan hak dan jumlah pendaftaran hak tanggungan rata-rata dalam 3 (tiga) tahun terakhir.

- b. Mengingat pesatnya pembangunan dan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tanggamus delapan tahun terakhir sudah selayaknya jika jumlah formasi PPAT bertambah. Sesuai dengan peraturan, formasi PPAT ditinjau kembali setiap 3 tahun. Pada tahun 1999 formasi PPAT Kabupaten Tanggamus ditetapkan sejumlah 30. Pada tahun 2007 formasi PPAT yang terisi sudah 33 dan masih dirasa kurang. Penetapan ini tentunya bertentangan dengan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 4 Tahun 1999 tentang Formasi PPAT. Berdasarkan peraturan yang ada formasinya hanya 30.

C. PENUTUP

Formasi jabatan PPAT diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 4 Tahun 1999 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP 37 tahun 1998, dan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 4 Tahun 1999 tentang Penetapan Formasi PPAT. Penetapan formasi PPAT di Kabupaten Tanggamus belum didasarkan 3 faktor, yaitu : jumlah kecamatan, jumlah pendaftaran peralihan hak dan jumlah pendaftaran hak tanggungan. Prosedur pengangkatan PPAT di Kabupaten Tanggamus sudah sesuai dengan peraturan yang ada, yakni PPAT yang bersangkutan mengusulkan kepada BPN melalui Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung setelah lulus ujian PPAT.

Belum adanya peraturan baru tentang penetapan formasi PPAT menjadi salah satu faktor penghambat dalam penetapan formasi PPAT di Kabupaten Tanggamus. Memperhatikan jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Tanggamus dan jumlah masyarakat yang memerlukan jasa PPAT, sudah seharusnya formasi PPAT ditambah. Apalagi formasi tersebut ditetapkan 8 tahun silam. Seharusnya dari tahun

1999 sampai dengan tahun 2007 sudah 2 (dua) kali perubahan formasi PPAT.

DAFTAR PUSTAKA

Mertokusumo, Sudikno. 1982. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty. Yogyakarta.

Notodisoerjo, Soegondo. 1983. *Hukum Notariat Di Indonesia suatu penjelasan*. Rajawali. Jakarta.

Hamzah, Andi. 1986. *Kamus Hukum*. Gramedia. Jakarta.

Parlindungan, A.P. 1999. *Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Mandar Maju. Bandung.

Harsono, Boedi. 2002. *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan Hukum Tanah*. Djambatan. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang *Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang *Jabatan Notaris*.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang *Pendaftaran Tanah*.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang *Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah*.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 4 Tahun 1999 tentang *Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah*.

Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 4 Tahun 1999 tentang *Penetapan Formasi PPAT*.